

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Permukiman yang Berkelanjutan dengan Dukungan Database Kependudukan dan Infrastruktur Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kec. Sombaopu Kab.Gowa

M. Yahya Siradjuddin¹, Hasrullah², Arifuddin Akil³

¹ Permukiman dan Lingkungan, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

² Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin.

³ Perencanaan dan Perancangan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Korespondensi: yahyasiradj70@gmail.com

Abstrak

Permasalahan lingkungan kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik. Beberapa permasalahan lingkungan dan infrastruktur permukiman pada sektor Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) yang dihadapi Kabupaten Gowa terkhusus di Kecamatan Somba Opu antara lain kegiatan air limbah, sarana dan prasarana persampahan serta sanitasi terkait pola hidup bersih dan sehat. Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Hasanuddin ke masyarakat untuk memetakan dan membuat database terkait kondisi penduduk, potensi desa dan infrastruktur permukiman sebagai data yang riil dan akurat untuk nantinya digunakan dalam perencanaan program-program pemerintah daerah yang tepat sasaran. Disamping itu pula, pengembangan potensi desa akan dapat lebih mudah diakses melalui database berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).

Kata-kunci: Lingkungan kumuh, Permukiman, Sistem Informasi Geografis

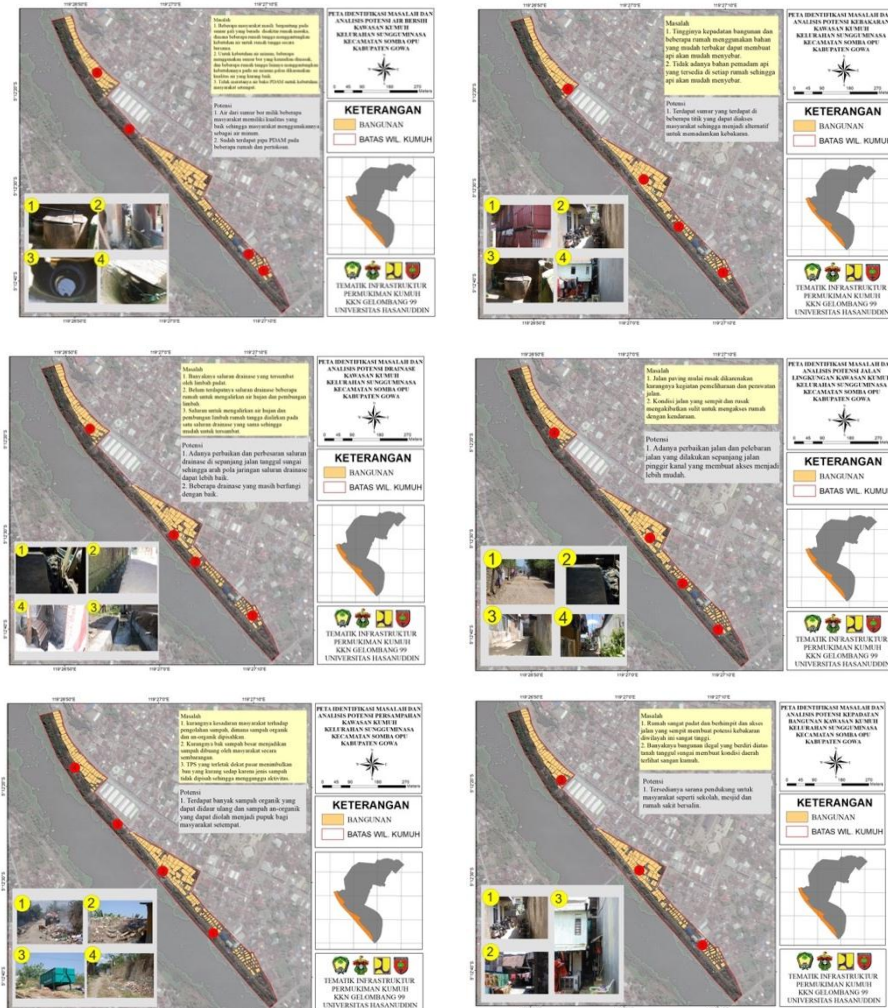
Pengantar

Di Kabupaten Gowa, sasaran pembangunan penanganan dan pengelolaan air limbah yang akan dicapai pada akhir tahun 2018 adalah praktek Buang Air Besar Sembarang tempat (BABS) dari 25,3 % menjadi 0 %. Untuk menghitung kebutuhan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 2,4% per tahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 0% dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 772.994 jiwa atau 193.25 KK. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk BAB pada sarana dan prasarana komunal yang sesuai standar kesehatan, pengelolaan dan kelembagaannya berbasis masyarakat.

Di Kecamatan Somba Opu, selain permasalahan penanganan limbah terdapat pula beberapa permasalahan persampahan terkait sarana dan prasarana meliputi : a) Jumlah penduduk cenderung meningkat mengakibatkan volume tumpukan sampah rumah tangga bertambah dan belum memasyarakatnya konsep 3R, b) Banyaknya tumpukan sampah yang tidak terangkut ke TPA serta, c) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan jam yang tepat.

Kelurahan Sungguminasa

Kelurahan Sungguminasa terbagi dalam 2 lingkungan yaitu lingkungan Sungguminasa yang terdiri 5 RW dan lingkungan Lambaselo terdiri dari 3 RW dengan jumlah total 8 RW, sedangkan jumlah total RT sebanyak 19 RT.

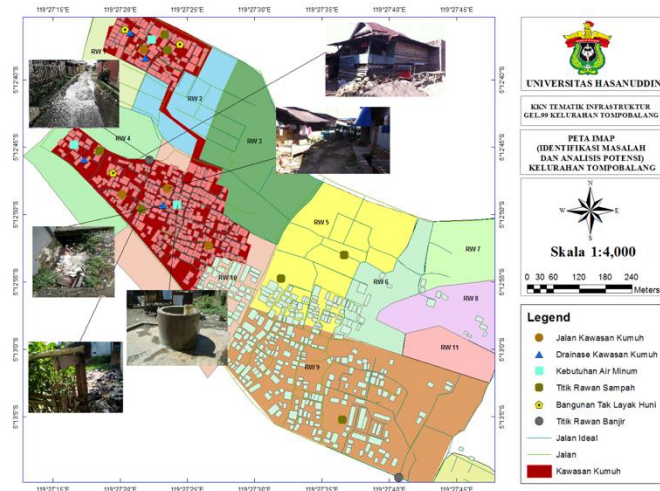


Gambar 2. Peta Kondisi Infrastruktur Permukiman Kel. Sungguminasa

Kelurahan Tompo Balang

Luas Wilayah kelurahan Tompobalang Kec Somba Opu adalah 60,77 Ha yang terbagi dalam 2 lingkungan yaitu lingkungan Cambaya 5 RW (RT 9) dan, lingkungan Je'neberang dengan jumlah ,RW 6 (RT 17) Jadi jumlah keseluruhan RW 11 Dan RT 26. Masyarakat kelurahan Tompobalang pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai pemerintah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Permukiman yang Berkelanjutan



Gambar 3. Peta Kondisi Infrastruktur Permukiman Kel. Tompobalang

Tabel 1. Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi Lingkungan di Kecamatan Sombaopu

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KONSEP PENANGANAN		STRATEGI PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Kec. Sombaopu	Bangunan gedung	Ada sekitar 7% atau 236 unit bangunan yang tidak layak huni.	1. Pengawasan 2. Pengendalian 3. Pemberdayaan	Peremajaan	Kampaye lingkungan rumah sederhana dan sehat	1. Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi seperti semula 2. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bangunan tidak layak huni
	Jalan lingkungan	Masih terdapat 37% atau 6293m yang berada dalam kondisi rusak.	1. Pengawasan 2. Pengendalian	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai standar jalan lingkungan	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
	Air Minum	733jiwa yang belum terlayani air minum	1. Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	1. Penyediaan jaringan air minum 2. Peningkatan kapasitas air minum permukiman
	Drainase Lingkungan	Saluran Drainase lingkungan yang tidak berfungsi optimal dengan panjang 5205,5	1. Pengawasan 2. Pengendalian 3. Pemberdayaan	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai kebersihan	1. Peningk. kapasitas saluran drainase permukiman 2. Pembuatan dan

		Meter			lingkungan.	rehabilitasi drainase 3. Melakukan pengerukan sedimen drainase
	Saluran Air Limbah	90,98 Ha tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah	1. Pemberdayaan 2. Melakukan jamboree sanitasi	Peremajaan	1. Pendampingan dan pelayanan informasi 2. Melakukan kegiatan yang sifatnya edukatif terkait sanitasi.	1. Peyediaan saluran air limbah permukiman 2. Peningkatan kapasitas saluran air limbah permukiman
	Pengelolaan Air Limbah	90, 98 Ha tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah	1. Sosialisasi tentang bahaya genangan air limbah 2. Sosialisasi Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Air limbah	1. Peningkatan system pengolahan air limbah 2. Pembangunan system pengolahan air limbah baru		
	Pengelolaan Persampahan	507 jiwa yang tertangani sampah 3510 jiwa atau yang terangkut sampah	1. Pengendalian dan pengawasan sarana sampah pada kawasan permukiman kumuh. 2. Melakukan sosialisasi berupa media. 3. Membuat aturan bersama 4. Mendorong perubahan perilaku dengan penguatan terkait sampah	1. Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah 2. Penambahan armada pengangkut sampah 3. Penambahan sarana tempat sampah dan TPS 4. Pembuatan tempat sampah terpadu perkawasan 5. Pembuatan lembaga yang mengelola sampah	1. Meningkatkan peran lembaga-lembaga yang ada seperti BKM, karang taruna, PKK, dan lainnya. 2. Bekerjasama dengan semua pihak, pemerintah, kelompok peduli dan pihak swasta yang konsentrasi menangani persoalan sampah 3. Menjemput dana CSR perusahaan swasta. 4. Pembentukan satgas sampah.	1. Peyediaan prasarana sampah 2. Pemasangan spanduk dan pembuatan brosur tentang sampah 3. Membuat spanduk aturan bersama yang dipasang di beberapa titik kawasan permukiman 4. Menggalakkan gerakan sabtu bersih yang berkelanjutan, di setiap titik kawasan permukiman.
	Sistem Proteksi Kebakaran	90.98Ha tidak memiliki system proteksi kebakaran	1. Pengawasan 2. pengendalian 3. Penegakan aturan membangun rumah 4. Sosialisasi waspada bahaya kebakaran 5. Membuat aturan bersama	1. Sosialisasi tentang bahaya kebakaran 2. Peyiapan prasaran kebakaran 3. Melakukan simulasi penanganan bahaya kebakaran 4. Membuat Master Plan Rawan	1. Pembentukan Satgas pemantau perijinan 2. Kampanye yang melibatkan aparat RT, RW dan tomas di setiap kawasan permukiman padat dan berkelanjutan	1. Penyediaan prasana pemadam kebakaran di kawasan permukiman padat 2. Pemasangan Hidrant Umum (HU) 3. Membuat dan memasang master plan kawasan rawan kebakar di

				kebakaran dan jalur evakuasi		kawasan permukiman padat 4. Memasang aturan bersama dan himbauan tentang waspada bahaya kebakaran
--	--	--	--	------------------------------	--	--

Refleksi

Pendampingan pemberdayaan masyarakat untuk infrastruktur permukiman terkait :

- a. Membangun kesadaran/kepedulian mengenai isu dan permasalahan: air minum, sanitasi, pengembangan permukiman dan penanganan kawasan kumuh (khusus untuk yang bertugas di perkotaan).
- b. Membantu masyarakat (desa/kelurahan) dalam memetakan kondisi potensi dan permasalahan terkait dengan air minum, sanitasi, permukiman dan kekumuhan.
- c. Membantu masyarakat dalam menyusun rencana untuk kondisi permukiman masa mendatang.
- d. Membantu masyarakat dalam menyiapkan kelembagaan desa/kelurahan untuk pengelolaan permukiman yang didalamnya mencakup gugus tugas khusus untuk air minum dan gugus tugas sanitasi.
- e. Membantu masyarakat dalam penyiapan aturan-aturan yang dibutuhkan untuk pengelolaan infrastruktur permukiman.

Beberapa capaian pada pengabdian ini ,yaitu :

1. Kemampuan pengelolaan infrastruktur secara mandiri dan berkelanjutan terkait aspek sosial, kelembagaan, keuangan dan lingkungan.
2. Peningkatan pengetahuan tentang aspek teknis pengelolaan infastruktur permukiman.
3. Kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana aksi keberlanjutan pengelolaan infrastruktur permukiman dengan dukungan database berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG).

Daftar Pustaka

- Matrizal I, K. Mudikdjo, M.S. Saeni 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Permukiman di Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Forum Pascasarjana 29: 95-110.
- Sarbi S. 2005. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Parepare [Disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. (tidak dipublikasikan). hlm. 40-57.
- Soemarwoto O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Ed ke-10. Jakarta: Djambatan. hlm. 51-102